



ANALISIS PEMETAAN POTENSI DAERAH DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KEUNGGULAN DAERAH DI PROVINSI ACEH

The Analysis of Potential Mapping in Order to Create Regional Advantages in Aceh Province

Putri Wulandari

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Lembaga Administrasi Negara

e-mail : putriwulandari37@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim Tanggal : 22 Januari 2018

Revisi Pertama Tgl. : 16 Maret 2018

Diterima Tanggal : 4 Juni 2018

Kata Kunci :

Pertumbuhan ekonomi, potensi daerah, Tipologi Klassen

Keywords :

Economic potential areas mapping, Klassen Typology, Aceh

ABSTRAK

Adanya hak istimewa yang disandang provinsi Aceh, bukan berarti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mendapatkan prioritas diantara daerah lain di Indonesia. Hal ini terbukti dari laju pertumbuhan ekonominya yang hanya mencapai 3,31 % jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,36 % pada Tahun 2016. Sejalan dengan perbaikan skala prioritas dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2018 Pemerintah Pusat akan mewujudkan beberapa proyek nasional di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen akan dilakukan pemetaan potensi daerah di Provinsi Aceh. Berdasarkan analisis ini yang termasuk ke dalam Kuadran I (sektor unggulan) adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Yang termasuk ke dalam kuadran II (sektor berkembang) adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Sektor Jasa Lainnya. Yang termasuk ke dalam Kuadran III (sektor potensial) adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian; serta Sektor Industri Pengolahan. Sementara tidak ada satu pun sektor lapangan usaha yang masuk dalam Kuadran IV. Adapun rekomendasi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi di Provinsi Aceh adalah melalui promosi dan ekspansi untuk sektor unggulan, intensifikasi untuk sektor yang masih berkembang, dan ekstensifikasi untuk sektor potensial.

Abstract

Aceh is one of the special areas in Indonesia. However, the existence of this province's privileges does not mean that economic growth and development are prioritized among other regions. Evidently, the economic growth rate which only reached 3.31% far below the economic growth rate of Indonesia which reached 5.36% in 2016. In line with the improvement of priority scale and to increase the growth of economy, by 2018 the Central Government will realize some national project in Aceh Province. The mapping of potential areas in Aceh Province will be carried out by using Klassen Typology analysis. Based on this analysis for Quadrant I are Agriculture, Forestry and Fishing Sectors; Construction Sector; Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles Sector; Transportation and Storage Sector; as well as the Public Administration and Defence, Compulsory Social Security. Included in Quadrant II are the Electricity and Gas Sector; Water Supply Sewerage, Waste Management and Remediation Activities Sector; Accommodation and Food Services Activities Sector; Information and Communication Sector; Financial and Insurance Sector; Real Estate Activities Sector; Business Activities Sector; Education Sector; Human Health and Social Work Activities Sector; and Other Services Activities Sector. Included in Quadrant III are the Mining and Quarrying Sector; and Manufacturing Sector. While none of the business fields are included in Quadrant IV. We recommended to optimize for developing the economic potential in Aceh Province by promotion and expansion for Quadrant I, intensification for Quadrant II, and extensification for Quadrant III.

A. PENDAHULUAN

Aceh, yang dikenal dengan istilah Serambi Mekah merupakan salah satu daerah istimewa di wilayah Indonesia. Dikatakan demikian karena

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh memiliki beberapa hak istimewa. Diantara hak istimewa yang diberikan pemerintah untuk

Provinsi Aceh antara lain penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, peran ulama dan penetapan kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang perekonomian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Aceh menyebutkan bahwa Aceh menganut perekonomian yang terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh. Selain itu, perekonomian Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan tersebut, seharusnya Aceh mendapatkan prioritas-prioritas tertentu dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun hingga Tahun 2016 kenyataannya tidak demikian. Salah satu hal yang paling menonjol dapat terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh yang hanya sebesar 3,31 % pada Tahun 2016. Angka ini jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia yang mencapai 5,36 % pada Tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Bahkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada Tahun 2015 masih jauh dari target pertumbuhan ekonomi

yang diharapkan tumbuh hingga 5,61 % pada Tahun 2017.

Sejalan dengan perbaikan skala prioritas, pada Tahun 2018 Pemerintah Pusat akan mewujudkan beberapa proyek nasional di Provinsi Aceh. Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan jalur Kereta Api (KA) Bireun - Lhokseumawe, Pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Konstruksi SBSN), Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan), serta proyek-proyek nasional lainnya. Selain untuk prioritas nasional, pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya, juga di Provinsi Aceh khususnya (Fuad, 2017).

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik di Provinsi Aceh, dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan menggenjot roda perekonomian pada sektor-sektor yang dijadikan sektor unggulan di Provinsi Aceh serta melakukan intensifikasi sekaligus ekspansi pada sektor-sektor yang potensial. Untuk menjawab hal tersebut, perlu dilakukan pemetaan potensi daerah di Provinsi Aceh.

Berdasarkan data, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Aceh pada Tahun 2012 - 2014 ditopang oleh tiga sektor utama yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sementara pada Tahun 2015 - 2016 struktur perekonomian Provinsi Aceh banyak ditopang oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Sektor Konstruksi. Tabel 1 berikut ini menunjukkan kontribusi setiap sektor lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2016.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2016

| No. | Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 25.42 | 25.93 | 26.16 | 27.65 | 27.81 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 13.67 | 12.64 | 11.28 | 8.28 | 6.95 |
| 3. | Industri Pengolahan | 8.52 | 7.91 | 7.19 | 5.76 | 5.25 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6. | Konstruksi | 8.51 | 8.68 | 9.06 | 9.57 | 10.45 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7. | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 14.26 | 14.68 | 15.06 | 15.76 | 15.73 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 7.50 | 7.62 | 7.70 | 7.93 | 7.62 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.19 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 3.36 | 3.44 | 3.52 | 3.62 | 3.61 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.49 | 1.54 | 1.54 | 1.60 | 1.70 |
| 12. | Real Estat | 3.16 | 3.25 | 3.44 | 3.71 | 3.87 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.63 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7.06 | 7.09 | 7.48 | 8.05 | 8.55 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 1.94 | 1.97 | 2.06 | 2.21 | 2.35 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.31 | 2.40 | 2.50 | 2.67 | 2.78 |
| 17. | Jasa Lainnya | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.29 | 1.33 |

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2017)

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dapat dilakukan dengan menggenjot roda perekonomian pada sektor-sektor yang dijadikan sektor unggulan serta melakukan intensifikasi sekaligus ekspansi pada sektor-sektor yang potensial. Namun, dengan hanya melihat kontribusi setiap sektor pada PDRB Provinsi belum cukup untuk mengetahui sektor mana yang masuk ke dalam sektor unggulan, berkembang, potensial, dan terbelakang. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan potensi daerah di Provinsi Aceh agar diketahui sektor mana yang termasuk pada keempat sektor tersebut.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pemetaan potensi ekonomi di Provinsi Aceh berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2012 hingga 2016. Dari hasil pemetaan potensi tersebut diharapkan dapat diketahui sektor yang unggul, sektor yang memiliki potensi yang tinggi, hingga sektor yang masih berkembang dan sektor terbelakang. Dengan adanya pemetaan tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Aceh dapat merencanakan pembangunan di wilayahnya dengan lebih baik guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan.

B. LANDASAN TEORITIS

Potensi Pendapatan

Potensi merupakan suatu karakteristik yang sudah ada, namun belum didapat atau diperoleh di tangan. Biasanya potensi ini sifatnya tersembunyi, sehingga untuk mendapatkan atau memperolehnya dibutuhkan upaya-upaya tertentu. Upaya yang

dilakukan untuk menggali potensi sumber daya alam tambang misalnya dalam bentuk eksplorasi dan eksploitasi, dan untuk potensi pajak dapat dilakukan dengan upaya pajak (*tax effort*).

Karena sifatnya yang masih tersembunyi, besarnya potensi pendapatan harus diteliti dengan seksama. Analisis potensi pendapatan bersifat luas. Hal ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan.

Potensi pendapatan suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya (Khusaini, 2015; Sinurat, 2016). Adanya perbedaan potensi pendapatan di setiap daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, potensi yang telah diketahui terkadang tidak dapat diolah secara optimal. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM), permodalan dan peraturan perundangan yang membatasi (Mahmudi, 2010).

Apabila dilihat berdasarkan tinggi rendahnya potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu (1) daerah dengan potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi; (2) daerah dengan potensi yang tinggi namun kemampuan mengelolanya rendah; (3) daerah dengan potensi yang rendah namun memiliki kemampuan mengelola tinggi; dan (4) daerah dengan potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah (Mahmudi, 2010; Priadmodjo, 2013). Keempat kategori tersebut disajikan dalam bentuk kuadran seperti Gambar 1 berikut.

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| POTENSI | | | | | |
| Tinggi | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>KUADRAN II (SEKTOR BERKEMBANG)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Tinggi ❖ Kemampuan Mengelola Rendah <p>Strategi yang dapat dilakukan: Intensifikasi</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>KUADRAN I (SEKTOR UNGGULAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Tinggi ❖ Kemampuan Mengelola Tinggi <p>Strategi yang dapat dilakukan: Promosi dan Ekspansi</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>KUADRAN IV (SEKTOR TERBELAKANG)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Rendah ❖ Kemampuan Mengelola Rendah <p>Strategi yang dapat dilakukan: Edukasi dan Pengembangan</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>KUADRAN III (SEKTOR POTENSIAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Rendah ❖ Kemampuan Mengelola Tinggi <p>Strategi yang dapat dilakukan: Ekstensifikasi/Ekspansi</p> </td> </tr> </table> | <p>KUADRAN II (SEKTOR BERKEMBANG)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Tinggi ❖ Kemampuan Mengelola Rendah <p>Strategi yang dapat dilakukan: Intensifikasi</p> | <p>KUADRAN I (SEKTOR UNGGULAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Tinggi ❖ Kemampuan Mengelola Tinggi <p>Strategi yang dapat dilakukan: Promosi dan Ekspansi</p> | <p>KUADRAN IV (SEKTOR TERBELAKANG)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Rendah ❖ Kemampuan Mengelola Rendah <p>Strategi yang dapat dilakukan: Edukasi dan Pengembangan</p> | <p>KUADRAN III (SEKTOR POTENSIAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Rendah ❖ Kemampuan Mengelola Tinggi <p>Strategi yang dapat dilakukan: Ekstensifikasi/Ekspansi</p> |
| <p>KUADRAN II (SEKTOR BERKEMBANG)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Tinggi ❖ Kemampuan Mengelola Rendah <p>Strategi yang dapat dilakukan: Intensifikasi</p> | <p>KUADRAN I (SEKTOR UNGGULAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Tinggi ❖ Kemampuan Mengelola Tinggi <p>Strategi yang dapat dilakukan: Promosi dan Ekspansi</p> | | | | |
| <p>KUADRAN IV (SEKTOR TERBELAKANG)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Rendah ❖ Kemampuan Mengelola Rendah <p>Strategi yang dapat dilakukan: Edukasi dan Pengembangan</p> | <p>KUADRAN III (SEKTOR POTENSIAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi Rendah ❖ Kemampuan Mengelola Tinggi <p>Strategi yang dapat dilakukan: Ekstensifikasi/Ekspansi</p> | | | | |
| Rendah | <p style="margin-left: 100px;">Rendah</p> <p style="margin-left: 100px;">Tinggi</p> <p style="text-align: center;">KEMAMPUAN MENGELOLA</p> | | | | |

Gambar 1. Peta Potensi Daerah

Sumber: (Mahmudi, 2010)

Kuadran I (sektor unggulan) merupakan kondisi yang ideal, dimana daerah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Sektor ini adalah sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut. Hal ini khususnya terkait dengan potensi ekonomi dari sumber daya alam yang tidak terbarui, seperti barang tambang.

Kuadran II (sektor berkembang) adalah kondisi dimana daerah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Kondisi seperti ini pada umumnya dialami oleh pemerintahan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi pada Kuadran II ini merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak, termasuk pihak asing untuk berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang tidak terkelola dengan baik.

Oleh karenanya, pada kondisi ini diperlukan semangat untuk melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak demikian, maka akan terjadi eksploitasi oleh kepentingan asing atau kepentingan pihak-pihak tertentu,

sehingga kesinambungan fiskal untuk generasi di masa yang akan datang terganggu. Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi ini diantaranya intensifikasi pendapatan, kemitraan dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang ada, *joint venture* dengan investor, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.

Kuadran III (sektor potensial) adalah kondisi dimana daerah memiliki potensi rendah namun pada dasarnya mempunyai kapasitas mengelola yang cukup tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan untuk menggali potensi adalah dengan melakukan ekstensifikasi atau ekspansi. Misalnya, suatu daerah tidak memiliki potensi hutan. Dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki mampu mengolah hasil hutan menjadi produk yang berkualitas tinggi. Daerah tersebut telah melakukan ekspansi dengan memanfaatkan potensi hasil hutan dari daerah lain untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Kuadran IV (sektor terbelakang) adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah. Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik. Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah terpenting untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menin Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah. PDRB timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non - residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Secara teknis, PDRB disajikan dalam dua bentuk hasil perhitungan, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sementara PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada Tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Data PDRB ini menjadi salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap Tahun. Manfaat yang diperoleh dari data ini antara lain adalah *Pertama* PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. *Kedua*, PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari Tahun ke Tahun. *Ketiga*, distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar merupakan basis perekonomian suatu wilayah. *Keempat*, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. *Kelima*, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per

kapita penduduk di suatu negara.

Pada tingkat provinsi, PDRB menggambarkan kemampuan provinsi tersebut menghasilkan nilai tambah pada suatu periode tertentu (Tahunan/triwulanan). PDRB dihitung dengan dua pendekatan, yaitu PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran.

Perubahan Tahun Dasar dan Klasifikasi PDRB

Selama sepuluh Tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada Tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan Tahun dasar PDB Indonesia dari Tahun 2000 ke Tahun 2010. Perubahan Tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan Tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Adapun manfaat perubahan Tahun dasar PDRB adalah:

1. Dapat menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi,
2. Meningkatkan kualitas data PDRB, dan
3. Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan PDRB menurut lapangan usaha. Jumlah sektor lapangan usaha dengan Tahun dasar 2000 adalah 9 (sembilan) sektor, sementara jumlah sektor lapangan usaha dengan Tahun dasar 2010 adalah 17 (tujuh belas) sektor. Perbandingan keduanya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Tahun Dasar 2000 dan 2010

| No. | PDRB Tahun Dasar 2000 | No. | PDRB Tahun Dasar 2010 |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| 1. | Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan | 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 2. | Pertambangan dan Penggalian |
| 3. | Industri Pengolahan | 3. | Industri Pengolahan |

| | | | |
|----|--|-----|--|
| 4. | Listrik, Gas, dan Air Bersih | 4. | Pengadaan Listrik dan Gas |
| 5. | Konstruksi | 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang |
| 6. | Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 6. | Konstruksi |
| 7. | PENGANGKUTAN DAN Komunikasi | 7. | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor |
| 8. | Keuangan, Real Estate, dan Jasa Keuangan | 8. | Transportasi dan Pergudangan |
| 9. | Jasa-jasa | 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| | | 10. | Informasi dan Komunikasi |
| | | 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi |
| | | 12. | Real Estat |
| | | 13. | Jasa Perusahaan |
| | | 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
| | | 15. | Jasa Pendidikan |
| | | 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| | | 17. | Jasa Lainnya |

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2017)

Dengan adanya perubahan Tahun dasar diiringi pula adanya penyesuaian subsektor pada setiap sektornya. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Adapun yang termasuk ke dalam kategori ini adalah; (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian; (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu; (3) Perikanan.

Sektor Pertambangan dan Penggalian dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Sektor Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, umur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Adapun yang termasuk ke dalam kategori industri pengolahan adalah (1) industri pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi; (2)

industri makanan dan minuman; (3) industri pengolahan tembakau; (4) industri tekstil dan pakaian jadi; (5) industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki; (6) industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman; (7) industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekam; (8) industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; (9) industri karet, barang dari karet, dan plastik; (10) industri barang galian bukan logam; (11) industri logam dasar; (12) industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik; (13) industri mesin dan perlengkapan; (14) industri alat angkutan; (15) industri furniture; (16) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan.

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minimum dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas, juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah,

seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya.

Sektor Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan berupa grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Sektor Transportasi dan Pergudangan mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak. Penyediaan angkutan dapat menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori ini terdiri atas angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan angkutan udara, pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan dan minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Sektor Informasi dan Komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk

kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori ini terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, rekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari kegiatan penjamin atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis Metode Klassen telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dengan lokus yang berbeda. Hasil penelitian Ratnasari pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa merupakan sektor yang maju dan tumbuh pesat. Sementara sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang maju tapi tertekan, sedangkan sektor industri pengolahan merupakan sektor potensial dan masih dapat berkembang di Kabupaten Kebumen (Ratnasari, 2014).

Miroah pada Tahun 2015 memetakan potensi Kota Semarang. Dengan menggunakan data PDRB pada Tahun 2009 – 2013 diperoleh bahwa yang termasuk sektor unggulan di kota ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor potensi di kota ini adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih. Sementara sektor terhambat adalah sektor bangunan, pertambangan dan penggalian, sedangkan sektor tertinggal adalah sektor pertanian (Miroah, 2015).

Kemudian, Elysanti, Hadi, dan Cahyo pada Tahun 2015 menganalisis potensi pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Jember. Hasilnya adalah wilayah yang cepat maju dan cepat tumbuh berada di Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Patrang. Namun pada akhir Tahun 2013 beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan dilihat dari tingkat laju pertumbuhan dan PDRB perkapita terus bertambah sehingga memasuki kuadran I yakni Kecamatan Puger Wuluhan, Ambulu, Tanggul, Bangsalsari dan Sumberbaru. Akan tetapi ada pula satu kecamatan

yang perekonomiannya masih berada di daerah relatif tertinggal (Elysanti et al., 2015).

Sementara itu pada Tahun 2010, Suprayitno dan Nurseto menganalisis pergeseran sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bantul pasca gempa. Hasilnya adalah komposisi keempat kuadran setelah gempa dan sebelum gempa pada dasarnya sama. Saat sebelum gempa pada Tahun 2006, hanya ada dua sektor yang mengalami pergeseran yaitu sektor bangunan dan sektor industri pengolahan. Sektor bangunan bergeser posisinya menuju posisi yang lebih baik yaitu dari posisi sektor yang tumbuh cepat namun tidak produktif menjadi sektor unggulan yaitu sektor yang tumbuh cepat dan produktif (Suprayitno & Nurseto, 2010).

C. METODE

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 selama lima Tahun yaitu 2012 - 2016 yang bersumber dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017. Periode lima Tahun yang digunakan ini diambil karena adanya perubahan harga konstan. Sebelum Tahun 2010, PDRB yang dihitung oleh BPS menggunakan Tahun dasar 2000, sejak Tahun 2010, penghitungan PDRB didasarkan atas Tahun dasar 2010.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Metode Tipologi Klassen. Metode ini digunakan untuk memetakan potensi daerah berdasarkan rata-rata nilai PDRB dan rata-rata laju pertumbuhannya.

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, menghitung rata-rata PDRB selama lima Tahun, dengan formula:

$$\hat{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n} \dots (1)$$

di mana \hat{Y} adalah rata-rata PDRB, Y_i adalah nilai PDRB Tahun ke- i , i adalah 2012 hingga 2016, dan n sama dengan 5 yaitu jumlah Tahun yang digunakan.

Kedua, menghitung rata-rata PDRB per sektor, yaitu dengan membagi rata-rata PDRB yang telah diperoleh pada langkah pertama dengan tujuh belas sektor yang terdapat dalam struktur PDRB. Formula yang digunakan adalah:

$$\overline{Y_{PDRB}} = \frac{\hat{Y}}{17} \dots (2)$$

di mana $\overline{Y_{PDRB}}$ adalah rata-rata PDRB per-sektor, 17 merupakan jumlah sektor yang terdapat pada PDRB.

Ketiga, menghitung rata-rata PDRB sektoral, yaitu jumlah nilai PDRB setiap sektor selama lima Tahun dibagi dengan jumlah Tahun yang digunakan, formulanya adalah sebagai berikut:

$$\overline{Y_{sektor j}} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_{sektor j i}}{5} \dots (3)$$

dimana $\overline{Y_{sektor j}}$ adalah rata-rata PDRB sektor j , $Y_{sektor j i}$ adalah nilai PDRB untuk sektor j Tahun ke- i , j merupakan sektor-sektor yang ada dalam PDRB.

Keempat, menghitung laju pertumbuhan PDRB Tahun ke- i dengan formula:

$$r_{PDRB i} = \frac{Y_{i+1} - Y_i}{Y_i} \times 100\% \dots (4)$$

di mana $r_{PDRB i}$ adalah laju pertumbuhan PDRB Tahun ke- i .

Kelima, menghitung rata-rata laju pertumbuhan PDRB, dengan formula:

$$\overline{r_{PRDB}} = \frac{\sum_{i=1}^4 r_{PDRB i}}{4} \dots (5)$$

dimana $\overline{r_{PRDB}}$ adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB, 4 merupakan jumlah Tahun yang digunakan dalam laju pertumbuhan PDRB.

Keenam, menghitung laju pertumbuhan PDRB sektor,

$$r_{sektor j i} = \frac{Y_{sektor j (i+1)} - Y_{sektor j i}}{Y_{j i}} \times 100\% \dots (6)$$

Ketujuh, menghitung rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor.

$$\overline{r_{sektor j}} = \frac{\sum_{i=1}^6 r_{sektor j i}}{4} \dots (7)$$

Setelah data diolah, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk menentukan sektor mana yang termasuk kategori unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang yang didasarkan pada perhitungan laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rata-rata nilai kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Keempat kategori tersebut dikenal sebagai Tipologi Klassen dengan kriteria yang tertera pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Klasifikasi Tipologi Klassen

| Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral | Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB | |
|-------------------------------------|---|---|
| | $\hat{Y}_{Sektorj} < \hat{Y}_{PDRB}$ | $\hat{Y}_{Sektorj} \geq \hat{Y}_{PDRB}$ |
| $r_{Sektorj} \geq r_{PDRB}$ | Kuadran II Sektor Berkembang | Kuadran I Sektor Unggulan |
| $r_{Sektorj} < r_{PDRB}$ | Kuadran IV Sektor Terbelakang | Kuadran III Sektor Potensial |

Sumber: (Mahmudi, 2010; Munandar & Winarko, 2015)

Adapun kriteria dari keempat kategori pada Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

1. Kuadran I disebut pula sektor unggulan apabila rata-rata PDRB Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata PDRB per sektor, dan rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor.
2. Kuadran II disebut pula sektor berkembang apabila rata-rata PDRB Sektoral lebih rendah daripada rata-rata PDRB per sektor, namun rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor.
3. Kuadran III disebut pula sektor potensial apabila rata-rata PDRB Sektoral lebih tinggi daripada rata-rata PDRB per sektor, dan rata-

rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral lebih rendah daripada rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor.

4. Kuadran IV disebut pula sektor terbelakang apabila rata-rata PDRB Sektoral lebih rendah daripada rata-rata PDRB per sektor, dan rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral lebih rendah daripada rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor.

D. PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB Provinsi Aceh

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh selama periode penelitian (2012 - 2016) menunjukkan data sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2016

| No. | Tahun | PDRB |
|-----|--------|----------------|
| 1. | 2012 | 108,914,807.60 |
| 2. | 2013 | 111,755,826.60 |
| 3. | 2014 | 113,490,359.30 |
| 4. | 2015* | 112,661,039.60 |
| 5. | 2016** | 116,386,730.60 |

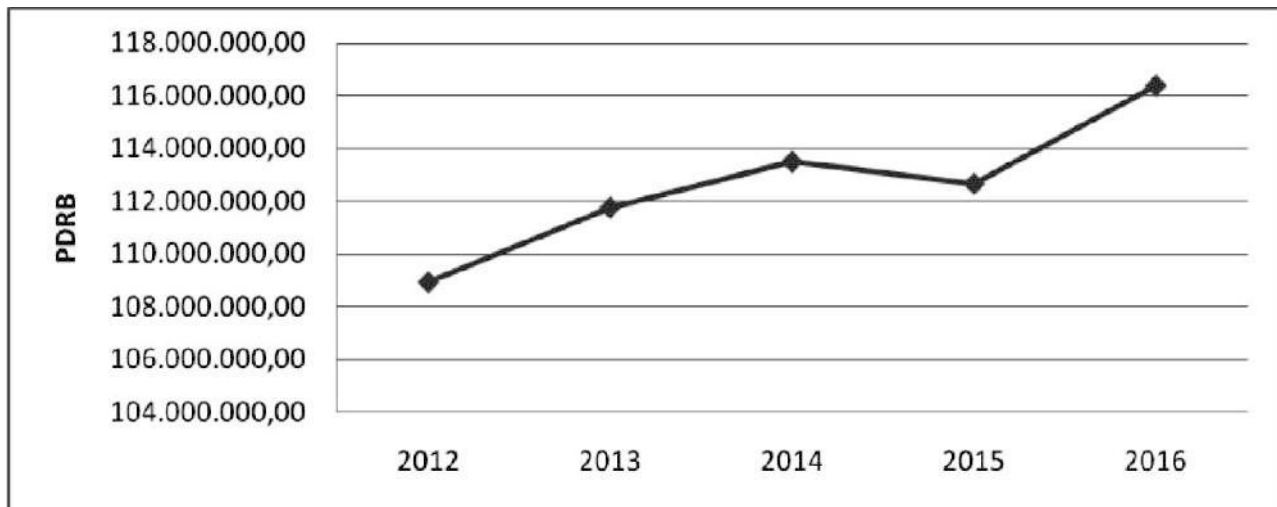
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2017)

Selama periode penelitian (2012-2016), *trend* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh mengalami kenaikan, dengan rata-rata PDRB sebesar Rp 112.641.752,74 Juta dan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar 1,68 % per Tahun. Dari 17 sektor lapangan usaha selama lima Tahun penelitian, sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB di provinsi ini adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan rata-rata PDRB sektor sebesar Rp 29.974.851,44 Juta. Sementara sektor lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan paling pesat terdapat pada sektor

pengadaan listrik dan gas dengan rata-rata laju pertumbuhan sektor sebesar 7,66 % per Tahun. Sebaliknya, sektor yang memberikan kontribusi terendah pada PDRB di Provinsi Aceh adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebesar Rp 32.340,06 Juta. Sedangkan sektor lapangan usaha yang memiliki laju pertumbuhan paling lambat terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata laju pertumbuhan sektor sebesar - 13,72 % (negatif) setiap Tahunnya.

Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan PDRB selama lima Tahun menunjukkan nilai yang positif, namun bukan berarti laju pertumbuhan PDRB setiap Tahunnya selalu bernilai positif pula.

Hal ini dapat diketahui dari nilai PDRB Tahun 2015 yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai PDRB Tahun 2014, seperti yang disajikan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Trend Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2016

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2017)

Menurunnya laju pertumbuhan PDRB pada Tahun 2014 terjadi karena lesunya perekonomian dari dua sektor lapangan usaha yang sangat drastis, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta

sektor industri pengolahan. Tabel 5 berikut ini menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB setiap sektornya.

Tabel 5. Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per Sektor

| No. | Lapangan Usaha | Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektor |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.98 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | (13.72) |
| 3 | Industri Pengolahan | (9.68) |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 7.66 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 6.71 |
| 6 | Konstruksi | 7.08 |
| 7 | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 4.20 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2.10 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6.98 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 3.51 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5.10 |
| 12 | Real Estat | 6.95 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 5.52 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6.66 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 6.75 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6.51 |
| 17 | Jasa Lainnya | 5.68 |

Sumber : diolah

Dari data yang tercantum pada Tabel 5 di atas diperoleh rata-rata PDRB (\hat{Y}), rata-rata PDRB per sektor (\hat{Y}_{PDRB}), dan rata-rata PDRB sektor j ($\hat{Y}_{sektor j}$)

adalah sebagai berikut pada Tabel 6 dan Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 6. Rata-rata PDRB dan Rata-rata PDRB per Sektor Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2016 dalam Juta Rupiah

| No. | Item | Jumlah |
|-----|--|----------------|
| 1. | Rata-rata PDRB (\hat{Y}) | 112.641.752,74 |
| 2. | Rata-rata PDRB per Sektor (\hat{Y}_{PDRB}) | 6.625.985,46 |

Sumber : diolah

Tabel 7. Rata-rata PDRB Sektor Lapangan Usaha Selama Periode 2012 - 2016

| No. | Lapangan Usaha | Rata-rata PDRB Sektor ($\hat{Y}_{sektor j}$) |
|-----|--|--|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 29,974,851.44 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 11,846,413.28 |
| 3. | Industri Pengolahan | 7,777,024.20 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 149,717.62 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 32,340.06 |
| 6. | Konstruksi | 10,434,206.70 |
| 7. | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 17,017,148.80 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 8,645,094.32 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,210,969.60 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 3,954,194.94 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,771,375.28 |
| 12. | Real Estat | 3,932,981.10 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 660,155.22 |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,623,804.92 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 2,374,201.92 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,854,635.88 |
| 17. | Jasa Lainnya | 1,382,656.10 |

Sumber: diolah

Setelah mendapatkan rata-rata PDRB masing-masing sektor lapangan usaha, kemudian dapat

diperoleh laju pertumbuhan PDRB setiap Tahun, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh Tahun 2012 - 2016

| No. | Tahun | Laju Pertumbuhan PDRB (r_{PDRBt}) |
|-----|-------|---------------------------------------|
| 1. | 2012 | 2,61 |
| 2. | 2013 | 1,55 |
| 3. | 2014 | - 0,73 |
| 4. | 2015 | 3,31 |

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2017)

Dari data di atas, selanjutnya diperoleh rata-rata laju pertumbuhan PDRB (r_{PDRB}) Provinsi Aceh yaitu sebesar 1,68 % setiap Tahunnya. Sementara

itu, untuk memperoleh rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor, dapat diperoleh melalui Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor dan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor di Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2015

| No. | Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektor |
|-----|---|--------|--------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.68 | 2.45 | 4.93 | 3.88 | 3.98 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | (5.16) | (9.35) | (27.11) | (13.27) | (13.72) |
| 3. | Industri Pengolahan | (4.78) | (7.62) | (20.56) | (5.74) | (9.68) |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 4.02 | 9.43 | 7.39 | 9.79 | 7.66 |
| 5. | Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 5.96 | 4.84 | 6.74 | 9.31 | 6.71 |
| 6. | Konstruksi | 4.64 | 6.01 | 4.85 | 12.81 | 7.08 |
| 7. | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 5.60 | 4.18 | 3.90 | 3.13 | 4.20 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 4.31 | 2.57 | 2.22 | (0.70) | 2.10 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6.17 | 6.71 | 6.66 | 8.39 | 6.98 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 4.96 | 4.08 | 2.12 | 2.88 | 3.51 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6.06 | 1.48 | 3.02 | 9.85 | 5.10 |
| 12. | Real Estat | 5.31 | 7.67 | 7.01 | 7.79 | 6.95 |
| 13. | Jasa Perusahaan Administrasi | 4.08 | 8.68 | 2.38 | 6.93 | 5.52 |
| 14. | Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.95 | 7.13 | 6.83 | 9.75 | 6.66 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 4.43 | 6.15 | 6.43 | 9.99 | 6.75 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6.69 | 5.61 | 6.04 | 7.72 | 6.51 |
| 17. | Jasa Lainnya | 4.74 | 5.94 | 5.36 | 6.70 | 5.68 |

Sumber: diolah

Pemetaan Potensi Daerah di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengolahan data, dengan menggunakan Tipologi Klassen dapat dianalisis sebagai berikut. *Pertama*, Rata-rata PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai Rp 29.974.851,44 Juta lebih besar dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,98 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki potensi

pendapatan tinggi, serta kemampuan mengelola potensi juga tinggi. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran I, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Aceh.

Kedua, Rata-rata PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai Rp 11.846.413,28 Juta lebih besar dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar - 1`17,72 % lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pertambangan dan



Penggalian memiliki potensi pendapatan yang rendah, namun kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran III, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor potensial di Provinsi Aceh.

Ketiga, Rata-rata PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan nilai Rp 7.777.024,20 Juta lebih besar dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebesar - 9,68 % lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Industri Pengolahan memiliki potensi pendapatan yang rendah, namun kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran III, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor potensial di Provinsi Aceh.

Keempat, Rata-rata PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai Rp 149.717,62 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,66 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Kelima, Rata-rata PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang dengan nilai Rp 32.340,06 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 6,71 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Keenam, Rata-rata PDRB Sektor Konstruksi

dengan nilai Rp 10.434.206,70 Juta lebih besar dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi sebesar 7,08 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Konstruksi memiliki potensi pendapatan tinggi, serta kemampuan mengelola potensi juga tinggi. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran I, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Aceh.

Ketujuh, Rata-rata PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp 17.017.148,80 Juta lebih besar dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,20 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki potensi pendapatan tinggi, serta kemampuan mengelola potensi juga tinggi. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran I, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Aceh.

Kedelapan, Rata-rata PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai Rp 8.645.094,32 Juta lebih besar dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,10 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki potensi pendapatan tinggi, serta kemampuan mengelola potensi juga tinggi. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran I, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Aceh.

Kesembilan, Rata-rata PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai Rp 1.210.969,60 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,98 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan

PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Kesepuluh, Rata-rata PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai Rp 3.954.194,94 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 3,51 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Kesebelas, Rata-rata PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai Rp 1.771.375,28 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,10 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Keduabelas, Rata-rata PDRB Sektor Real Estate dengan nilai Rp 3.932.981,10 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Real Estate sebesar 6,95 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Real Estate memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Ketigabelas, Rata-rata PDRB Sektor Jasa Perusahaan dengan nilai Rp 660.155,22 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Perusahaan sebesar 5,52 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Jasa Perusahaan memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Keempatbelas, Rata-rata PDRB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai Rp 8.623.804,92 Juta lebih besar dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,66 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki potensi pendapatan yang tinggi, serta kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran I, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Aceh.

Kelimabelas, Rata-rata PDRB Sektor Jasa Pendidikan dengan nilai Rp 2.374.201,92 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Pendidikan sebesar 6,75 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Jasa Pendidikan memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Keenambelas, Rata-rata PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai Rp 2.854.635,88 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju



Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,51 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Ketujuhbelas, Rata-rata PDRB Sektor Jasa Lainnya dengan nilai Rp 1.382.656,10 Juta lebih kecil dibandingkan dengan Rata-rata PDRB per sektor

Provinsi Aceh dengan nilai Rp 6.625.985,46 Juta. Sementara Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Lainnya sebesar 5,68 % lebih tinggi dibandingkan dengan Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB per sektor sebesar 1,68 %. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Jasa Lainnya memiliki potensi pendapatan yang tinggi, namun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Sektor ini masuk ke dalam Kuadran II, dimana sektor ini merupakan salah satu sektor berkembang di Provinsi Aceh.

Dari analisis di atas, dapat dibuatkan matriks Tipologi Klassen seperti pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Peta Potensi Daerah Provinsi Aceh Berdasarkan Tipologi Klassen

| | | Kemampuan Mengolah | |
|---------|--------|---|--|
| | | Rendah | Tinggi |
| Potensi | Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sektor Pengadaan Listrik dan Gas ❖ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ❖ Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ❖ Sektor Informasi dan Komunikasi ❖ Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi ❖ Sektor Real Estate ❖ Sektor Jasa Perusahaan ❖ Sektor Jasa Pendidikan ❖ Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial ❖ Sektor Jasa Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian ❖ Sektor Konstruksi ❖ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ❖ Sektor Transportasi dan Pergudangan ❖ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib |
| | Rendah | - | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sektor Pertambangan dan Penggalian ❖ Sektor Industri Pengolahan |

Sumber: diolah

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap daerah Provinsi Aceh sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Potensi pendapatan yang tinggi dapat dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektoral yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB per sektor ($\overline{Y_{PDRB}} > \overline{Y_{sektor\ j}}$). Di Provinsi Aceh, potensi pendapatan tinggi terdapat pada hampir seluruh sektor lapangan usaha, kecuali pada dua sektor yaitu Sektor

Pertambangan dan Penggalian, serta Sektor Industri Pengolahan.

Sementara itu, kemampuan mengelola sektor-sektor yang ada dapat dikatakan tinggi apabila rata-rata PDRB sektoral lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB per sektor. Di Provinsi Aceh, kemampuan mengelola yang tinggi terdapat pada tujuh sektor, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, yang memadukan antara potensi pendapatan dengan kemampuan mengelola, diperoleh empat kuadran. Kuadran I yaitu sektor unggulan dengan potensi pendapatan tinggi dan kemampuan mengelola tinggi. Sektor-sektor yang masuk pada kuadran I di Provinsi Aceh adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Kuadran II yaitu sektor berkembang dengan potensi pendapatan tinggi namun kemampuan mengelola rendah. Sektor-sektor yang masuk pada kuadran II di Provinsi Aceh adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Sektor Jasa Lainnya.

Kuadran III yaitu sektor potensial dengan kemampuan mengelola tinggi, namun potensi pendapatan yang ada rendah. Sektor-sektor yang masuk pada kuadran III di Provinsi Aceh adalah Sektor Pertambangan dan Pengalihan; serta Sektor Industri Pengolahan.

Kuadran IV yaitu sektor terbelakang dengan kemampuan mengelola rendah, dan potensi pendapatan pun rendah. Di Provinsi Aceh, tidak ada satu pun sektor lapangan usaha yang masuk dalam kategori ini.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi di Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh harus tetap menjaga sumber pendapatan yang berasal dari sektor unggulan seperti Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dilakukan agar tercipta kesinambungan fiskal antar generasi. Pemerintah Provinsi Aceh melalui dinas-dinas terkait dapat memberikan fasilitasi terhadap sektor-sektor ini melalui promosi dan ekspansi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi pemerintah dapat membuat kebijakan agar potensi yang berasal dari sektor-sektor ini dapat bertahan hingga generasi mendatang.

Kemudian untuk sektor yang masih berkembang seperti Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Sektor Jasa Lainnya merupakan sektor yang rawan karena potensi tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola yang baik. Strategi pengelolaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk sektor ini adalah dengan melakukan intensifikasi pendapatan, melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang ada, melakukan *joint venture* dengan investor, serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.

Sementara untuk sektor yang masuk ke dalam kategori potensial, yakni Sektor Pertambangan dan Pengalihan serta Sektor Industri Pengolahan strategi pengelolaan yang dapat dilakukan adalah dengan ekstensifikasi pada subsektor-subsektor di kedua sektor tersebut.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2017). *PDRB Provinsi Aceh*. Provinsi Aceh.
- Elysanti, S., P, T. H., D, H. C., Iesp, J., Ekonomi, F., & Unej, U. J. (2015). Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember (*Tipology Analysis and Sector Potential In Regional Economic Development of Jember District*).
- Fuad, H. (2017). 1. Retrieved January 9, 2018, from <https://ekbis.sindonews.com/read/1198576/34/bappenas-kebut-pembangunan-infrastruktur-aceh-1492604111>
- Khusaini, M. (2015). A Shift-share Analysis on



- Regional Competitiveness - A Case of Banyuwangi District, East Java, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 738-744. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.097>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Miroah, C. (2015). Analisis penentuan sektor unggulan kota Semarang melalui pendekatan tipologi klassen.
- Munandar, T. A., & Winarko, E. (2015). Regional Development Classification Model using Decision Tree Approach. *International Journal of Computer Applications*, 114(8), 975-8887.
- Priadmodjo, A. (2013). Comparative Study of Millennium Development Goals (MDGs) Achievement in Various Regional Economic Typology in Indonesia. *5th International Graduate Student Conference on Indonesia*, (October 30-31).